**ANALISIS STATUS KEDUDUKAN GERAKAN KELOMPOK HOUTHI DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK YAMAN**

**Shinta Bella Maulidya Firdaus**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Bisnis dan Humaniora

Universitas Teknologi Yogyakarta

Email : [shintabellamf@gmail.com](mailto:shintabellamf@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kedudukan salah satu organisasi di Yaman yaitu Gerakan Kelompok Houthi yang memiliki kekuatan besar di wilayah Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Membicarakan krisis di Yaman tidak akan terlepas dari Gerakan Kelompok Houthi dimana mereka memiliki tujuan besar dalam mengubah pemerintahan Yaman menjadi pemerintahan yang Imamah. Dengan alasan tersebut ada kalanya mereka menginginkan sebuah pengakuan dunia secara *de facto* maupun de jure. Namun dari pihak PBB selaku organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dunia belum pernah mendeklarasikan secara resmi status Gerakan Kelompok Houthi. Kemudian secara yuridis pengakuan secara de facto telah dimiliki gerakan ini dikarenakan Gerakan Kelompok Houthi telah menguasai beberapa kota besar di Yaman termasuk Ibukota Yaman yaitu Sana’a. Untuk pengakuan secara *de jure* belum pernah dilakukan oleh pemerintah Yaman sendiri maupun dari negara lain. Lebih jelasnya terdapat indikator Hukum Humaniter Internasional yang menyimpulkan Gerakan Kelompok Houthi telah memenuhi persyaratan sebagai Belligerent. Indikator tersebut termuat dalam pasal - pasal Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Diperkuat kembali status Belligerent ini dengan adanya Hukum Internasional yang mana menjelaskan bahwa Belligerent adalah satu - satunya tahapan pemberontak yang lebih terorganisir dan hal tersebut ada dalam Gerakan Kelompok Houthi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Humaniter Internasional dengan menerapkan pasal - pasal Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan juga memasukkan Perspektif Konstruktivisme dalam memandang respon Houthi dari implikasi status yang diberikan. Hasil penelitian dalam skripsi ini penulis menunjukkan bahwa status yang tepat menurut Hukum Humaniter Internasional dalam menanggapi Gerakan Kelompok Houthi adalah Belligerent.

**Kata Kunci:** Kelompok Houthi, Belligerent, Hukum Humaniter Internasional, dan Konstruktivisme.

***STATUS ANALYSIS OF THE HOUTHI GROUP MOVEMENT***

***REVIEWED FROM INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW***

***IN THE YEMEN CONFLICT***

**Shinta Bella Maulidya Firdaus**

*International Relations Study Program*

*Faculty of Business & Humanities*

*University of Technology Yogyakarta*

Email : [shintabellamf@gmail.com](mailto:shintabellamf@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the status of one of the organizations in Yemen, namely the Houthi Group Movement which has great power in the Yemeni region in terms of International Humanitarian Law. Talking about the crisis in Yemen cannot be separated from the Houthi Movement, where they have a big goal in turning the Yemeni government into an Imamate government. For this reason there are times when they want a de facto or de jure. However, the United Nations as the organization tasked with maintaining world peace has never officially declared the status of the Houthi Group Movement. Then juridically, de facto because the Houthi movement has controlled several major cities in Yemen, including the capital of Yemen, namely Sana'a. For de jure has never been done by the Yemeni government itself or from other countries. More specifically, there are indicators of International Humanitarian Law which conclude that the Houthi Group Movement has met the requirements as a Belligerent. These indicators are contained in the articles of the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocol of 1977. This Belligerent status is reinforced by the existence of International Law which explains that Belligerent is the only stage of a more organized rebel and this is in the Houthi Group Movement. The research method used in this study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The analytical tool used in this research is International Humanitarian Law by applying the articles of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol and also including the Constructivism Perspective in viewing the Houthi response from the status implications given. The results of the research in this thesis indicate that the appropriate status according to International Humanitarian Law in responding to the Houthi movement is Belligerent.*

***Keywords:*** *Houthi group, Belligerent, International Humanitarian Law, and Constructivism.*